KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

9X9I3OOF

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 6 7 6			H.4 X Final			
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 7 2 4 7 0 0 9 3 5 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : MIKKI SINDI								
B. PPh PASA	L 21 YANG DIPOTON	IG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)		JAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01		5.988.500	5.988.500	0	5	299.425	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 247								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy						2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor :	Nomor : Tanggal							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		-	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Ir	Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subu	nit Organisasi	:						
C.4 Tanggal :		2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>					
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	t mengatur bahwa do	kumen ini tela	ah ditandatangani secara	